

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku–Buku :

- Abhan, Asep Mufti, dan Achwan, 2017, *Pasangan Calon Melawan Kotak Kosong*, CV. Rafi Sarana Perkasa, Semarang, hlm. 11.
- Massa Djafar, "*krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi : Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi* ", Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm 29.
- MB.Zubakhrum Tjentreng, "*Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia* ", Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm 28.
- Joseph A. Schumpeter, "*Capitalism Socialisme & Democracy* ", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 239
- Wendy Melfa, "*Pemilukada Demokrasi dan Otonomi Daerah* ", BE Press, Lampung, 2013, hlm. 12-13
- Rambe Kamarul Zaman, "*Perjalanan Panjang Pilkada Serentak* ", Expose, Jakarta Selatan, 2016, hlm 19.
- Muhadam Labolo dan Tegus Ilham, S.Stp, "*Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Praktik dan Isu Strategi* ", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 11.
- Abhan, Asep Mufti, dan Achwan, "*Pasangan Calon Melawan Kotak Kosong* ", CV. Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2017, hlm 11.

Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3.

Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 9.

Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 17.

Ronny Hanitijo Soemitro, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 154.

Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal.20-22.

Rizkiyansyah, Ferry Kurnia, "Pemilu dan Demokrasi Terkonsolidasi : Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2014", Epicisentrum Mahadaya Komunika. Jakarta, 2017, hlm 37.

Sodikin, "Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan", Gramata Publishing, Jakarta, 2014, hlm.17-19.

Titik Triwulan Tutik, "Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.329-330

Fajlurrahman Jurdi, " Pengantar Hukum Pemilihan Umum ", Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm 99-100.

Baderal Munir, "Dinamika Kelompok : Penerapan dalam Laboratorium Ilmu Perilaku", Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001 ,hlm 16.

A Rahman HI, "Sistem Politik Indonesia", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.

149

Fajlurrahman Jurdi, "Pengantar Hukum Pemilihan Umum", Kencana, Jakarta, 2018, hlm, 30-32.

Pratama, Heroik M., Agustiyati, Khoirinnisa, dan Sadikin, Usep Hasan. 2018. "Politik anggaran di Pilkada: Studi Perbandingan Besaran Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 Petahana dan Non Petahana di 17 Provinsi, dalam Pembiayaan Pemilu di Indonesia", Sukmajati, Jakarta, 2018, hlm 17.

B. Jurnal

Novembri Yusuf Simanjuntak, 2020, "*Pilkada Satu Pasangan Calon Tahun 2017 di Kabupaten Pati dan Kota Tebing Tinggi studi tentang third party campaign dalam Pilkada Satu Pasangan Calon Tahun 2017 sebagai persaingan yang bebas dan adil*", www.journal.kpu.go.id, Edisi. 2, Juni 2020, FISIP Universitas Airlangga, KPU Kabupaten Serdang Bedagai, Bedagai, hlm 50.

Indaru Setyo Nurprojo, Bagongan, "*Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera: Belajar dari Purbalingga*", Jurnal Politik Indonesia : Indonesian Political Science Review I , Volume 15 Nomor 2, 2016, Jakarta, hlm. 121.

Yusuf Adam Hilman, Khoirurrasyidin, dan Niken Lestarini, “ *Peta politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi Covid-19*”, Jurnal Ilmu Politik, Volume 2 Nomor 2 , 2020, Jakarta, hlm 130.

Ridho Imawan Hanafi, “*Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik*”, Jurnal Penelitian Politik, Volume 11 Nomor 2, 2014,kudus, hlm 2.

M.Iwan Satriawan,” PENGARUH CALON KEPALA DAERAH PEREMPUAN DALAM PILKADA (STUDI PILKADA LAMPUNG 2015-2018), jurnal BAWASLU 2018, Volume1 Nomor 2, 2018, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung ,hlm 101 - 117

Fabio Emiliano Kolang, Audi H. Pondaag dan Josina E. Londa,” Penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil dan bersih menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum”, jurnal ilmu hukum, Volume 19 Nomor 2, 2020, Fakultas Hukum UNSRAT,Manado, hlm 17.

Sun Fatayati,”Relevansi asas-asas pemilu sebagai upaya menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas’, jurnal Institut Agama Islam,Volume 28 Nomor 1,2017, Institut Agama Islam Tribakti,Kediri,hlm 149

Novembri Yusuf Simanjuntak,” Pilkada satu pasangan calon tahun 2017 di Kabupaten Pati dan kota Tebing Tinggi (studi tentang third party campaign dalam pilkada satu pasangan calon tahun 2017 sebagai persaingan yang bebas dan adil”, jurnal KPU,Edisi 2,2020, Fisip Universitas Airlangga,Jakarta, hlm 57.

Mahpudin,” Protest Voting dan Abstention dalam Pilkada Calon Tunggal :

Kasus Pilkada serentak 2018”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 5 Edisi
2, 2021, Departemen Politik Pemerintahan Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, hlm 57

Rafif Pamenang Imawan,” KERANGKA EVALUASI PILKADA Evaluasi
Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu”, Jurnal Adhyasta
Pemilu, Vol.3 No.2 2020, Populi Center, Jakarta, Hal.159-182.

Mahpudin,” Protest Voting dan Abstention dalam Pilkada Calon Tunggal:
Kasus Pilkada Serentak 2018”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 05
Nomor 02 Februari 2021, Departemen Politik Pemerintahan Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 156.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota,

Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts
012.329311/IV/2016 tentang pedoman Teknis Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun
2017.

D. Sumber Internet

Dian Erika Nugraheny dan Andi Nur Aminah, “*Jumlah Calon Tunggal Pilkada
Tercatat Terus Meningkat*”, www.nasional.republika.co.id , tanggal
akses 11 Maret 2023.

Widya Lestari Ningsih , “*6 Asas Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia*”,
[https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/03/080000379/6-asas-
pemilihan-umum-pemilu-di-indonesia?page=all](https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/03/080000379/6-asas-pemilihan-umum-pemilu-di-indonesia?page=all) , tanggal akses 10 april
2023.

Saeno,” *PILKADA SERENTAK 2017: Kandidat Borong Dukungan. Jumlah
Parpol Pengusung Perlu Dibatasi?*”,
[https://kabar24.bisnis.com/read/20160925/15/586759/pilkada-serentak-
2017-kandidat-borong-dukungan.-jumlah-parpol-pengusung-perlu-
dibatasi](https://kabar24.bisnis.com/read/20160925/15/586759/pilkada-serentak-2017-kandidat-borong-dukungan.-jumlah-parpol-pengusung-perlu-dibatasi) , tanggal akses 29 Maret 2023.

Martin Sihombing, “*KPU: Pilkada Serentak Tahap II digelar 15 Februari
2017*”, www.kabar24.bisnis.com , tanggal akses 15 maret 2023.

Andhika Prasetya, “*Ini 171 Daerah Gelar Pilkada serentak 27 Juni 2018*”,
www.news.detik.com , tanggal akses 20 maret 2023.

Kpu

kota

tangerang, “*Pengertian Pemilu*”, <https://kotatangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu>, tanggal akses 8 maret 2023.

Issha Harruma, “*Definisi Partai Politik Menurut Ahli dan Undang-undang*”
<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>, tanggal akses 7 maret 2023.

Ananda, “*Mengenal Fungsi Partai Politik, Pengertian dan Sejarah Partai Politik*”,
<https://www.gramedia.com/literasi/fungsi-partai-politik/>, diakses 7 Maret 2023.

Firman, “*Pengertian Pilkada*”,
<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/10/01/pengertian-pilkada/>, diakses 13 april 2023.

Puspasari Setyaningrum, “*Sejarah Pilkada dari 2015 hingga 2019*”,
<https://regional.kompas.com/read/2022/01/27/200758078/sejarah-pilkada-dari-2015-hingga-2019?page=all>. diakses 7 maret 2023.

Fitria Chusna Farisa, “*Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan*”,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan>, diakses 7 maret 2022.

Addi M Idhom, "PILKADA SERENTAK 2017: Kandidat Borong Dukungan. Jumlah Parpol Pengusung Perlu Dibatasi?", <https://tirto.id/mengapa-pilkada-pati-penting-dan-menarik-cjhU> , diakses 2 mei 2023.

E. Interview

Sugeng Santosa , S.Sos, “Data Kantor”, Sekretaris KPU Kabupaten Pati, 07 Februari 2023,Kantor KPU Kabupaten Pati, Pati.

Sugeng Santosa , S.Sos, “Data Kantor”, Sekretaris KPU Kabupaten Pati, 07 Februari 2023,Kantor KPU Kabupaten Pati, Pati.

Imbang Setiawan,S.T, “Wawancara Pribadi”, Ketua KPU Kabupaten Pati, 01 Februari 2023,Kantor KPU Kabupaten Pati, Pati.

Haryanto, SH, MM, M.Si, “Wawancara Pribadi”, Bupati terpilih Periode 2017-2022 , 11 Februari 2023,Kantor PMI Kabupaten Pati, Pati.

Indah Sulistyorini, S.E, “Wawancara Pribadi”, Warga yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pati , 27 Februari 2023, Rumah Puri Indah Gang 7, Pati.

Supriyanto, S.H. M.H, “Wawancara Pribadi”, anggota KPU Kabupaten Pati Periode 2013 - 2023, 19 Februari 2023,Kantor KPU Kabupaten Pati, Pati.

Ahmadi, S.Sos, SH,MH, “Wawancara Pribadi”, Ketua Bawaslu Kab.Pati Tahun 2018 – 2023, 19 Februari 2023,Kantor KPU Kabupaten Pati, Pati.

Endah Sri Wahyuningati “Wawancara Pribadi”, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pati, 23 Februari 2023,Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Pati, Pati.